

**ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK  
TERHADAPPRESIDEN MELALUI MEDIA SOSIAL  
(PUTUSAN NOMOR : 354/PID.SUS/2016/PN. JAKSEL )**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**NUR SOLEH**

**5115500131**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2019**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK  
TERHADAP PRESIDEN MELALUI MEDIA SOSIAL  
(Putusan Nomor : 354/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.)**

***ANALYSIS OF CRIMINAL DEFAMATION WHICH AGAINST THE  
PRESIDENT THROUGH SOCIAL MEDIA  
(Number Decision : 354/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel)***

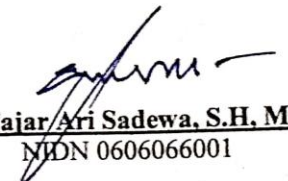
**Nur Soleh**

**NPM 5115500131**


Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, Februari 2019

Pembimbing I

  
**Dr. Fajar Ari Sadewa, S.H, M.H**  
NIDN 0606066001

Pembimbing II

  
**Siswanto, S.H, M.H**  
NIDN 0013126401

Mengetahui,

Dekan

  
  
**Dr. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag**  
NIDN 0615067604

**PENGESAHAN**

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK  
TERHADAP PRESIDEN MELALUI MEDIA SOSIAL  
(Putusan Nomor : 354/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.)**

***ANALYSIS OF CRIMINAL DEFAMATION WHICH AGAINST THE  
PRESIDENT THROUGH SOCIAL MEDIA  
(Number Decision : 354/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel)***


**NUR SOLEH**

**NPM 51155000131**

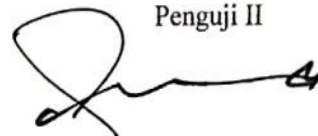
Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, Februari 2019

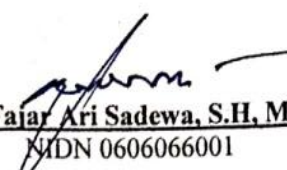
Penguji I

  
**Dr. Hamidah Abdurachman, S.H, M.Hum**  
NIDN 0022105601


Penguji II

  
**Dr. Achmad Irwan H, S.HI, M.Ag**  
NIDN 0615067604


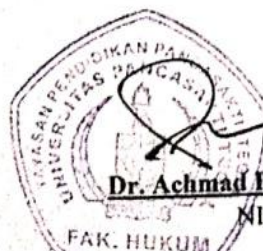
Pembimbing I

  
**Dr. Fajar Ari Sadewa, S.H, M.H**  
NIDN 0606066001

Pembimbing II

  
**Siswanto, S.H, M.H**  
NIDN 0013126401

Mengetahui,  
Dekan

  
  
**Dr. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag**  
NIDN 0615067604

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Soleh  
NPM : 5115500131  
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 31 Oktober 1995  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : **ANALISIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN  
NAMA BAIK TERHADAP PRESIDEN  
MELALUI MEDIA SOSIAL  
( Putusan Nomor : 354/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel )**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya peneliti sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan peneliti ini tidak benar, maka peneliti bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 6 Februari 2019  
Yang menyatakan

(NUR SOLEH)

## **ABSTRAK**

Nur Soleh. ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP PRESIDEN MELALUI MEDIA SOSIAL (Putusan Nomor : 354/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel). Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Tegal, 2019.

Adanya sebuah permasalahan di dalam penggunaan media sosial yang menyebabkan terjadinya perkara pidana, seperti pencemaran nama baik terhadap Presiden di media sosial.

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap Presiden melalui media sosial dalam hukum positif Indonesia (2) Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor :354/Pid.Sus/2016/PN. Jkt.Sel.

Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yaitu yuridis normatif karena mengkaji hukum positif. Adapun metode pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dengan cara mencari dan mengumpulkan, serta meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang berhubungan dengan judul dan pokok permasalahan. Dalam metode analisis data yang digunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik, Media Sosial.

## **ABSTRACT**

Nur Soleh. ANALYSIS OF CRIMINAL DEFAMATION AGAINST THE PRESIDENT TROUGH SOCIAL MEDIA (Number Decision : 354/Pid.Sus/2016/PN.South Jakrta ). Essay. Tegal : Jurisprudence Faculty of Law Pancasakti University, Tegal. 2019.

There is a problem in using of social media causes criminal cases, such as defamation of the president on social media.

The goal of this research : (1) the regulation of criminal defamation against the president through social media in Indonesian positive law (2) to determine the judge's consideration in the number decision : 354/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

The research do the research using approach method that is normative because is studies positive law. As for the method of collecting data the way searching and collecting the research in library, and research pustaka materials which are secondary data related with title an subject matter. With method of data analysis in used qualitative data analysis.

Based on the results of this study, it is expected that it will become an information an input material for students, academics, practitioners, ad all parties in need in the Pancasakti University Tegal Law Faculty

Keywords : Criminal defamation, social media

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Ibu Tri Murni dan Bapak Untung Setyo Wibowo selaku orang tua tercinta yang tidak henti mengiringi dengan do'a
- Seseorang wanita yang akan menjadi jodoh saya kelak
- Saudara-saudaraku tercinta
- Teman-temanku tersayang

## MOTTO

- Tidak ada masalah besar, itu semua tergantung pada level kehidupan kita.
- *Out of the comfort zone*
- *"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba, jika kalian beriman. Jika kalian tidak mau melaksanakannya maka umumkan untuk berperang dengan Allah dan rasul-Nya..."*

**(QS. Al-Baqarah: 278 - 281)**



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, *alhamdulillah* penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Burhan Eko Purwanto, M.Hum (Rektor Universitas Pancasakti Tegal).
2. Dr. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag (Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
3. Tiyas Vika Widyastuti, SH, MH (Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
4. Dr. Fajar Ari Sadewo, SH, MH (Dosen Pembimbing I) dan Siswanto, SH, MH (Dosen Pembimbing II) yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dewan Penguji.
6. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1.
7. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik.

8. Mamah Tri Murni dan Bapak Untung Setyo Wibowo selaku orang tua saya yang selalu memberikan dukungan moriil pada penulis dalam menempuh studi.
9. Saudara-saudaraku tercinta.
10. Kamu yang telah memberikan support gaib
11. Kawan-kawan UKM SENSASI UPS Tegal yang telah memberikan wadah berkreasi selama ini.
12. Rekan-rekan BEM Fakultas Hukum yang telah berkerja sama untuk membangun kecerdasan.
13. Teman-teman dan semua pihak yang telah banyak membantu dan memberi motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 6 Februari 2019

**Peneliti**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur Soleh  
NPM : 5115500131  
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 31 Oktober 1995  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Jalan Apel 3 Blok E.3 No. 26 Perumahan Griya Bahari Sentosa, Kelurahan Dampyak, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal  
Riwayat Pendidikan :

No.	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1	SD Muhammadiyah 2	2000	2007
2	SMP Negeri 10 Tegal	2007	2010
3	SMA Negeri 2 Tegal	2010	2013
4	S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal	2015	-

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 6 Februari 2019

Hormat saya,

( NUR SOLEH )

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT.....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
MOTTO .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. PengertianTindak Pidana.....	11
B. Pengertian Pencemaran Nama Baik .....	13

C. Jenis- Jenis Tindak Pidana .....	23
D. Jenis-Jenis Putusan Hakim .....	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	30
A. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Presiden Melalui Media Sosial dalam Hukum Positif Indonesia.....	30
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor : 354/Pid.Sus/2016/2016/PN.Jkt.Sel .....	38
C. Analisis Peneliti.....	50
BAB IV PENUTUP .....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA .....	63

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun. Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundangundangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana.

Teknologi adalah pedang bermata dua, ia dapat digunakan untuk tujuan baik dan jahat sekaligus.

Teknologi selalu diciptakan untuk lebih memudahkan atau lebih mensejahterakan kehidupan kita. Tetapi perkembangan dan penggunaannya di tangan manusia (berdosa) membuktikan bahwa kehadiran dan penggunaan suatu teknologi tidak selalu positif. Teknologi dapat dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk menguasai orang banyak. Teknologi militer digunakan untuk menekan baik secara fisik maupun mental sekelompok orang agar takluk pada kemauan pemilik teknologi tersebut. Teknologi komunikasi digunakan untuk memanipulasi informasi dan mengubah perilaku massa agar sesuai dengan keinginan penguasa teknologi tersebut, misalnya pemerintah dan industri. Manusia bukan saja dapat menciptakan Alat untuk mensejahterakan sesama tetapi juga untuk memper-Alat sesamanya lewat Alat yang diciptakannya (Adji A. Utama, 1996).

Berbagai macam tindak pidana salah satunya adalah pencemaran nama baik. Perkembangan teknologi yang semakin pesat sudah mulai dirasakan oleh manusia. Khususnya masyarakat Indonesia, banyak sekali masyarakat sudah menikmati dan aktif dalam penggunaan media sosial. Mulai dari Whatsapp, twitter, facebook, Instagram, LINE dan lain sebagainya.

Berdasarkan laporan yang berjudul “ Essential Insights Into Internet, social media, mobile, and E-Commerce Use Around The World”, yang diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2018. Dari total populasi masyarakat di Indonesia sebanyak 265, 4 juta jiwa, pengguna aktif media sosial mencapai 130 juta jiwa dengan penetrasi 49 % .

Itu berarti bahwa Indonesia memiliki keaktifan yang luar biasa dalam menggunakan Internet dan media sosial. Walaupun dapat dikatakan kecepatan internet di Indonesia yang masih lambat tidak seperti pada negara tetangga di Asia Tenggara.

Tekno-Legislati (*tecno-legislation*) atau Legislasi Teknologi menjadi suatu paradigma dan kerangka baru dalam pembentukan hukum dan norma. Tekno-Legislati dalam pemahaman Dogmatika Hukum menjadi paralel dengan munculnya paradoks Teori Hukum yang telah memasuki Abad Digital Informasi.<sup>1</sup>

Fungsi daripada Internet dan media sosial pun bermacam-macam dalam masyarakat Indonesia, mulai dari untuk mencari informasi, komunikasi kepada rekan-rekannya, posting pribadi, bahkan sampai dalam hal dagang melalui media sosial sudah banyak didapatkan di Internet, atau biasa kita kenal online shop.

Tetapi ada yang miris dari pengguna media sosial itu sendiri, banyak yang menggunakan untuk menyebar informasi palsu atau biasa disebut Hoax. Postingan berupa kata-kata, gambar atau video yang bertujuan untuk menebar kebencian terhadap rekan, pemerintah bahkan sampai Kepala Negara yang saat-saat ini sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di media sosial.

Salah satu penyalahgunaan media sosial terdapat pada kasus yang melibatkan seorang terdakwa dengan nama Dr. Yulianus Paongan, S.Si, M.Si alias @YPAONGANAN alias Yulian Paongan. Pekerjaan terdakwa

---

<sup>1</sup> Danrivanto Budhijanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, Cet. Ke-1, 2017, hlm. 113.



yaitu Executif Director Indonesia Maritime Institute dan Dosen Pasca Sarjana IPB Bogor, sehingga dikatakan terdakwa seorang yang memiliki ilmu lebih karena terdakwa mempunyai pendidikan S-3. Terdakwa diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap Presiden Negara Republik Indonesia, yaitu Ir. Joko Widodo dengan cara terdakwa beberapa kali memposting gambar dan kata-kata yang tidak pantas. Salah satunya di akun twitter ONGEN#jalamangkara @ypaonganan memposting satu buah foto Ir. Joko Widodo dan satu buah foto Nikita Mirzani dan menuliskan status dengan kata-kata : *#PapaMintaPaha*. Status ini telah dibaca atau di retweets oleh 28 followers. Dan beberapa kali mempostingnya lagi. Dan sampai pernah mengupload gambar alat kelamin anak laki-laki dan menuliskan status dengan kata-kata kotor dan tidak pantas.

Pada tanggal 13 Desember 2015, Terdakwa memposting satu buah foto Ir. Joko Widodo dan 1 buah foto Nikita Mirzani dengan status "*Walah..#PapaDoyanLonye #PapahDoyanLonte*". Status ini telah dibaca dan di retweets oleh 11 followers. Beberapa jam kemudian Terdakwa memposting dengan postingan yang sama. Pada hari itu, Terdakwa berulang kali memposting kata-kata tidak pantas.

Sampai terakhir pada tanggal 15 Desember 2015, terdakwa dengan menggunakan akun twitternya mengupload gambar alat kelamin anak laki-laki dan menuliskan status "*@PartaiSocmed yang ini ya med*" dan dibawahnya mengupload screen capture @PartaiSocmed berupa tampilan akun twitter Ongen Vito Cerleone @ypaonganan dengan tulisan status

*“woalaaahhh...inikah titit si @PartaiSocmed alias @AnantaRajasa..?gmn sunatnya ya...? ☺”*. Status ini telah dibaca dan di retweet oleh 1 followers.

Adapun tulisan-tulisan yang dibuat oleh terdakwa melalui sarana media elektronik tersebut, telah melanggar norma-norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat.

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun tulisan-tulisan yang dibuat dan disebarluaskan oleh terdakwa tersebut yang memuat persengamaan dan alat kelamin.

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf e jo Pasal 29 UU Nomor : 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis ingin mengajukan judul skripsi dengan judul **“ANALISIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN TERHADAP PRESIDEN MELALUI MEDIA SOSIAL (PUTUSAN NOMOR : 354/PID.SUS/2016/PN. JAKSEL )**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis akan mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap presiden melalui media sosial dalam hukum positif Indonesia ?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor :354/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel ?

### **C. Tujuan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap presiden di media sosial dalam hukum positif Indonesia
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor :354/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk perkembangan produk hukum yang sudah ada, disamping itu diharapkan dapat memberikan masukan-masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Selain itu, penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan atau informasi yang mempunyai kepentingan dengan masalah tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada mahasiswa sebagai bahan diskusi untuk lebih dikembangkan guna mencari solusi dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

3. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum di Pengadilan Negeri agar dalam mengadili pelaku tindak pidana pencemaran nama baik terhadap presiden dan melalui media sosial agar dapat menjatuhkan putusan yang adil
4. Diharapkan hasil penelitian pada penulisan skripsi ini dapat memberikan wawasan kepada khalayak umum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research* yang secara logawiyah berarti mencari kembali.<sup>2</sup> Fungsi penelitian adalah mendapatkan kebenaran.<sup>3</sup>

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan yuridis normatif karena mengkaji hukum tertulis atau hukum positif, serta mencakup sistematika dan materi hukum. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum normatif diperoleh dari studi kepustakaan, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>4</sup>

##### **2. Jenis dan Sumber Data**

---

<sup>2</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. Ke-13, 2012, hlm. 27.

<sup>3</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 20.

<sup>4</sup>Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-3, 2015.

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu penetapan tujuan penelitian harus jelas, kemudian mencari perumusan masalah yang akan dibahas, kemudian mencari teori dan konsep, kemudian mencari dan menelusuri dan mengumpulkan data primer maupun sekunder yang relevan setelah itu diolah dan dituangkan dalam skripsi ini, untuk mendapatkan data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui, yaitu data sekunder, merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum atau tersier.<sup>5</sup> Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi undang-undang dasar tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku karya ilmiah, dan lain-lain. Sehingga dapat membantu untuk menganalisa dan memahami

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 141.

bahan hukum dan objek penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder antara lain artikel, berita dari internet, koran, kamus hukum dan bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

3. Metode Analisis Data

Untuk menghasilkan informasi penelitian yang lebih rasional dan objektif, disini penulis sebagai instrumen analisis, akan menggunakan metode analisis yuridis-kualitatif. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif.

**F. Sistematika Penulisan**

1. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini penulis menyampaikan mengenai: (a) Latar Belakang Masalah; (b) Rumusan Masalah; (c) Rumusan Masalah; (d) Manfaat Penelitian; (e) Metode Penelitian; (f) Sistematika Penulisan.
2. **Bab II Tinjauan Pustaka**, yang akan menyajikan landasan teori mengenai masalah-masalah yang akan dibahas meliputi Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik, Jenis-Jenis Tindak Pidana, dan Jenis-Jenis Putusan Hakim

3. **Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan**, yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya, yaitu tentang faktor yang mendorong masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dalam suatu putusan Pengadilan.
4. **Bab IV Penutup**, merupakan penutup yang berisikan simpulan dan saran dari hasil penelitian ini dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil penelitian yang ditemukan yang dipergunakan sebagai pembahasan atas hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>6</sup>

Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>7</sup>

Dalam literatur telah banyak dijelaskan pengertian dan makna hukum pidana sebagai salah satu bidang dalam ilmu hukum. Pendefinisian Hukum pidana harus dimaknai sesuai dengan sudut pandang yang menjadi acuannya. Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniend*. *Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif. hukum pidana ini dalam

---

<sup>6</sup> Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. Hlm 81

<sup>7</sup> *Ibid*.



pengertian menurut Mezger adalah "aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana." Pada bagian lain Simons merumuskan hukum pidana objektif sebagai "Semua tindakan-tindakan keharusan (gebod) dan larangan (verbod) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya, yang kepada pelanggar ketentuan tersebut diancam derita khusus, yaitu pidana, demikian juga peraturan-peraturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu. Selain itu Pompe merumuskan hukum pidana objektif sebagai semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaiannya.<sup>8</sup>

Sebagai bahan perbandingan perlu kiranya dikemukakan pandangan pakar hukum pidana Indonesia tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana (objektif). Moeljatno memberikan makna hukum pidana sebagai bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasardasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan

---

<sup>8</sup> Kadarudin (ed), *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016, hlm. 2.

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Perumusan Moeljatno mengindikasikan bahwa hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang 3 unsur yakni aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan proses verbal penegakan hukum jika terjadi tindak pidana. Unsur ini menunjukkan keterkaitan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil, yang bermakna bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana materil tidak akan ada artinya tanpa ditegakkannya hukum pidana formil (hukum acara pidana). Demikian pula sebaliknya hukum pidana formil tidak dapat berfungsi tanpa ada pelanggaran norma hukum pidana materil (tindak pidana).<sup>9</sup>

## **B. Pengertian Pencemaran Nama Baik**

Sampai kini belum ada definisi hukum di Indonesia yang seragam tentang apa yang disebut pencemaran nama baik. Dalam bahasa Inggris pencemaran nama baik dikenal dengan istilah *defamation*, *slander*, *libel* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pencemaran nama baik, fitnah lisan, dan fitnah tertulis.

Dalam kamus bahasa Indonesia sendiri, hinaan diartikan sebagai nistaan, cercaan dan caci-makian. Sedangkan penghinaan yaitu proses, perbuatan, cara menistakan. Adapun arti Menghina yaitu memandang rendah, merendahkan, memburukkan nama baik orang lain, mencemarkan nama baik orang lain,

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 3.

memaki-maki. Jadi, kamus Bahasa Indonesia memberikan penekanan bahwa pencemaran nama baik lebih hanya pada person/pribadi seseorang.<sup>10</sup>

Berdasarkan sebagai perbuatan menyerang nama baik atau kehormatan seseorang, memandang rendah harkat dan martabat orang lain, sehingga orang tersebut merasa dirugikan atau dicemarkan nama baiknya.

Yang diserang disini bukanlah nama baik dalam arti seksual sebagaimana bahwa menyerang nama baik dalam arti seksual tidak termasuk dalam pencemaran nama baik yang dimaksud dalam Pasal ini, karena diatur sendiri dalam lingkup kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 sampai Pasal 303 KUHP.<sup>11</sup>

Hal ini dinilai bahwa penggunaan istilah pencemaran nama baik lebih cocok untuk menggambarkan jenis pidana dalam UU ITE ini, karena meskipun pencemaran nama baik dalam KUHP berada dalam lingkup tindak pidana tentang penghinaan, tapi secara umum semuanya menuju pada satu tujuan dan maksud yaitu mencemarkan nama baik orang yang diserang atau orang yang dikenai perbuatan itu.

#### 1) Bentuk Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik terlihat dari 2 macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan, dan pencemaran nama baik secara tertulis.

---

<sup>10</sup> Wildan Muchladun, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik", dalam *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 3, 2015, hlm. 4.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Dalam bukunya, Oemar Seno Adji menyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi sebagai berikut<sup>12</sup> :

a. Penghinaan materiil

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

b. Penghinaan formil

Dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.

2) Pencemaran Nama Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hukum pidana mengatur penghinaan dalam KUHP pada BAB XVI, Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP, penghinaan dalam bab ini meliputi enam macam, yaitu<sup>13</sup>:

---

<sup>12</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*, Jakarta: Erlangga, 1985

<sup>13</sup> Anggi Abdul Rahman, "Tentang Tindak Pidna Penghinaan dan Atau Pencemaran Nama Baik", <http://handrecht.blogspot.com/2017.09/v-behaviorurldefaultvmlo.html?m=0>. Diakses tanggal 4 Februari 2019 Jam 15.24 WIB.

a) Pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai pencemaran;

“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Banyak pakar yang menggunakan istilah “menista”. Perkataan “menista” berasal dari kata “nista”. Sebagian pakar menggunakan kata “celaan”. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata “smaad” dari Bahasa Belanda. Kata “nista” dan kata “celaan” merupakan kata sinonim. Unsur-unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP, dibagi dua yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur-Unsur Objektif:

- Barangsiapa
- Menyerang kehormatan atau nama baik ”seseorang”
- Dengan menuduhkan suatu hal.

Unsur Subjektif:

- Dengan maksud yang nyata (kenlijk doel) supaya tuduhan itu diketahui umum (ruchtbaarheid te geven);
- Dengan sengaja (opzettelijk)

b) Pasal 310 ayat (2) KUHP mengenai pencemaran tertulis;

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Istilah “menista secara tertulis” oleh beberapa pakar dipergunakan istilah “menista dengan tulisan”. Perbedaan tersebut disebabkan pilihan kata-kata untuk menerjemahkan yakni kata *smaadschrift* yang dapat diterjemahkan dengan kata-kata yang bersamaan atau hampir bersamaan.

Berdasarkan rumusan diatas maka menista dan menista dengan tulisan mempunyai unsur-unsur yang sama, bedanya adalah bahwa menista dengan tulisan dilakukan dengan tulisan atau gambar sedangkan unsur-unsur lainnya tidak berbeda. Unsur-unsur tersebut yaitu:

- Barangsiapa;
  - Dengan sengaja;
  - Menyerang kehormatan atau nama baik ”seseorang”;
  - Dengan tulisan atau gambar yang disiarkan;
  - Dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan.
- c) Pasal 311 ayat (1) KUHP mengenai memfitnah;
- “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
- Kata “fitnah” sehari-hari umumnya diartikan sebagai yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni:
- “perkataan yang dimaksud menjelekkkan orang....”.

Dalam ilmu hukum pidana, fitnah adalah menista atau menista dengan surat/tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu, diizinkan membuktikannya dan ternyata, tidak dapat membuktikannya. Menurut Pasal 313 KUHP, membuktikan kebenaran ini juga tidak diperbolehkan apabila kepada si korban dituduhkan suatu tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan, dan pengaduan ini in concreto tidak ada.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP tampaknya erat terkait dengan ketentuan Pasal 310 KUHP. Sehingga dapat ditarik unsur-unsur kejahatan yang terkandung yaitu:

- Semua unsur (objektif dan subjektif) dari :
  - i. Pencemaran [Pasal 310 ayat (1)] atau
  - ii. Pencemaran Tertulis [Pasal 310 ayat (2)]
- Si pembuat dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkannya itu benar;
- Tetapi si pembuat tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya;
- Apa yang menjadi isi tuduhannya adalah bertentangan dengan yang diketahuinya.

d) Pasal 315 KUHP mengenai penghinaan ringan;

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena

penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Kata “penghinaan ringan” diterjemahkan dari bahasa Belanda yaitu kata *eenvoudige belediging*; sebagian pakar menerjemahkan kata *eenvoudigedenda* kata “biasa”, sebagian pakar lainnya menerjemahkan dengan kata “ringan”. Dalam Kamus Bahasa Belanda, kata *eenvoudig*: sederhana, bersahaja, ringan. Dengan demikian, tidak tepat jika dipergunakan kata penghinaan biasa.

Unsur-unsur Pasal 315 KUHP:

Unsur Objektif:

- Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran (dengan lisan) atau pencemaran tertulis;
- Yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan;
- Dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya.

Unsur Subjektif: Dengan sengaja.

- e) Pasal 317 ayat (1) KUHP mengenai mengadu secara memfitnah;

“Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

- 3) Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik



Di abad ini, hampir bisa dipastikan bahwa setiap orang yang memiliki telepon pintar, juga mempunyai akun media sosial, seperti facebook, twitter, path, instagram, dan sebagainya. Kondisi ini seperti sebuah kelaziman yang mengubah bagaimana cara berkomunikasi pada era serba digital seperti sekarang. Jika dahulu, perkenalan dilakukan dengan tukar menukar kartu nama, namun sekarang setiap bertemu orang baru cenderung bertukar alamat akun atau membuat pertemanan di media sosial.

Evolusi yang terjadi di bidang teknologi maupun inovasi internet menyebabkan perubahan pada aspek kehidupan manusia. Yang seolah-olah kehidupan tidak memiliki batasan. Beberapa hal sudah tidak menjadi privasi melainkan bersifat terbuka untuk umum.<sup>14</sup>

Istilah media sosial tersusun dari dua kata, yaitu “media” dan “sosial”. “Media” diartikan sebagai alat komunikasi. Sedangkan kata “sosial” diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Dari pernyataan ini, dapat ditegaskan bahwa media dan perangkat lunak merupakan “sosial” atau dalam makna bahwa keduanya merupakan produk dari proses sosial.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Mulawarman dan Aldila Dyas Nurfitri, “Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan”, dalam *Jurnal Buletin Psikologi*, Volume 25, Nomor 1, 2017, hlm. 36.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 37.

Dari pengertian masing-masing kata tersebut, dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah alat komunikasi yang digunakan oleh pengguna dalam proses sosial.

Ketentuan tentang pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam UU ITE tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP. Bila dicermati isi Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE tampak sederhana bila dibandingkan dengan pasal-pasal penghinaan dalam KUHP yang lebih rinci. Oleh karena itu, penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk pada pasal-pasal penghinaan dalam KUHP. Misalnya, dalam UU ITE tidak terdapat pengertian tentang pencemaran nama baik. Dengan merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.<sup>16</sup>

a. Pasal 27 ayat (3) UU ITE

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"

b. Pasal 310 ayat (1) KUHP

"Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 37.

Rumusan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang tampak sederhana berbanding terbalik dengan sanksi pidana dan denda yang lebih berat dibandingkan dengan sanksi pidana dan denda dalam pasal-pasal penghinaan KUHP.

Misalnya, seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE akan dijerat dengan Pasal 45 Ayat (1) UU ITE, sanksi pidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda maksimum 1 milyar rupiah.

c. Pasal 45 UU ITE

“(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Masih ada pasal lain dalam UU ITE yang terkait dengan pencemaran nama baik dan memiliki sanksi pidana dan denda yang lebih berat lagi, perhatikan pasal 36 UU ITE.

d. Pasal 36 UU ITE

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain"

Misalnya, seseorang yang menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 12 tahun dan/atau denda maksimum 12 milyar rupiah (dinyatakan dalam Pasal 51 ayat 2)

e. Pasal 51 ayat (2) UU ITE

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

### C. Jenis – jenis Tindak Pidana

1. Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan KUHP dibagi menjadi Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan dan Pelanggaran disebut *rechtsdelicten* atau tindak hukum pidana, dapat diartikan bahwa sifat tercelanya itu tidak semata-mata termuat dalam undang-undang saja. Melainkan memang pada dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum diatur dalam rumusan peraturan perundang-undangan. Walaupun sebelum dimuat dalam perundang-undangan, kejahatan telah mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi berupa melawan hukum materiil. Sebaliknya, *wetsdelicten* merupakan sifat tercelanya suatu perbuatan yang terletak setelah dimuat di dalam UU. Jadi sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah UU.<sup>17</sup>

2. Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan perumusannya dibagi menjadi Delik Formil dan Delik Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan

---

<sup>17</sup> Kiki Rizki, “Jenis – Jenis Tindak Pidana”, <https://www.kaskus.co.id/thread/534a15c138cb17a8718b463f/jenis-jenis-tindak-pidana-copas-tapi-lupa-sumbernya-hehehe/> hlm.1. diakses tanggal 21 November 2018 Jam 0.36 WIB.

tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.

Sedangkan dalam perumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang tu tidaklah penting. Misalnya pada pembunuhan (pasal 338 KUHP) inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan dari wujud menembak, membacok atau memukul. Untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya suatu perbuatan.

Begitu juga dengan selesainya tindak pidana materiil, tidak tergantung sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

Contoh-contohnya:

- a. Delik formil: pencurian (362)
  - b. Delik materiil: kejahatan terhadap nyawa (338)
3. Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan sumbernya dibagi menjadi Delik Umum dan Delik Khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KHUP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat dalam kodifikasi tersebut.

Walaupun telah ada kodifikasi (KUHP), tetapi adanya tindak pidana diluar KHUP merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Perbuatan-perbuatan tertentu yang dinilai merugikan masyarakat dan patut diancam dengan pidana itu terus berkembang, sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan, yang tidak cukup efektif dengan hanya menambahkannya pada kodifikasi (KUHP).

Tindak pidana diluar KUHP tersebar didalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan perundang-undangan itu berupa peraturan perundang-undangan pidana.

Contoh-contohnya:

- a. Delik umum: KUHP.
- b. Delik khusus: UU No. 31 th 1999 tentang tindak pidana korupsi, UU No. 5 th 1997 tentang psikotropika, dll.

#### D. Jenis Putusan Hakim

1. Putusan Pembebasan yang mengandung Pembebasan Terdakwa (*Vrijpraak*)

Putusan ini diatur di dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan :

*“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”*

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.<sup>18</sup>

Penerapan putusan bebas (*vrijspreek*) dalam hukum pidana adalah berdasarkan asas bahwa tiada seseorang dapat dipidana tanpa kesalahan, atau *Geen Straf Ohne Schuld* (Belanda) atau *Keine Straf Ohne Schuld* (Jerman) atau *No Punishment Without Guilty* (Inggris). Jadi dalam suatu putusan bebas, unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadaterdakwa dipersalahkan. Putusan bebas dapat terjadi, karena di dalam hukum pidana itu, kesalahan merupakan faktor yang paling fundamental untuk menetapkan seseorang itu bisa dihukum atau tidak. Putusan bebas dapat terjadi, karena di dalam kita pahami

---

<sup>18</sup> C. Jiman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, Cet ke-1, 2018, hlm. 182

“*mens rea* (sikap batin), merupakan prinsip atau ide yang ada dalam kejahatan dan merupakan pikiran yang jahat dan sekaligus menjadi sumber terjadinya kejahatan.”<sup>19</sup>

Apabila pengadilan menjatuhkan putusan bebas bagi seorang terdakwa, maka terdakwa atau penuntut umum tidak berhak mengajukan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan pula tidak dapat mengajukan kasasi, sesuai pada Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan bebas tidak dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung baik oleh terdakwa maupun penuntut umum. Akan tetapi kalau kita melihat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 14. PW. 07. 03 Tahun 1983 tentang tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana butir 19 (sembilan belas) disebutkan: terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada Jurisprudensi.<sup>20</sup>

## 2. Putusan yang Mengandung Pelepasan dari Segala Tuntutan (*Ontslog van Rechtsvervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum itu dirumuskan di dalam tuntutan itu dirumuskan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yaitu :

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 183.



*“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”*

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>21</sup>

Adapula pasal-pasal di dalam KUHP yang mengatur tentang dasar-dasar yang meniadakan hukuman, yang mengatur gugurnya hak Jaksa untuk melakukan penuntutan, karena meninggalnya tersangka pada Pasal 77 KUHP dan karena daluwarsa/ lewat waktu melakukan penuntutan yang diatur pada Pasal 78 KUHP.

### 3. Putusan yang Mengandung Penghukuman Terdakwa (*Veroordeling*) atau Pidanaan

Sebagai putusan yang berisi suatu hukuman sudah jelas didasarkan pada bukti-bukti yang ada kesemuanya itu menunjukkan Terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana. Di dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP menyebutkan :

*“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”*

Hakim di dalam memberikan putusannya itu harus dengan penuh tanggung, penuh kejujuran, tidak berpihak, dan senantiasa harus mengingat sumpah jabatannya. Keputusan Hakim harus

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 187

mempunyai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan bukan saja kepada yang mempunyai kepentingan secara langsung, melainkan juga terhadap masyarakat umumnya. Dengan keputusannya hakim harus menunjukkan bahwa ia tidak membuat keputusan secara sewenang-wenang dan telah melaksanakan peradilan secara terbuka dan jujur.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Presiden Melalui Media Sosial dalam Hukum Positif Indonesia**

Istilah yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana “Penghinaan”. Dipandang dari sisi sarana atau obyek delicti, yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut yakni melindungi “kehormatan”, maka tindak pidana terhadap kehormatan lebih tepat. Tetapi jika dipandang dari sisi *feit* atau perbuatan maka tindak pidana tidak keliru. Maksudnya “kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia, dengan demikian hanya manusia yang dapat memiliki kehormatan dan nama baik.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 310 dan pasal 311 secara terang mengancam dengan pidana penjara dan denda bagi seseorang yang dengan menuduh orang lain melakukan suatu hal. Namun, upaya terhadap perlindungan terhadap martabat manusia tersebut belum dapat terealisasi secara berarti.

Penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media massa. Fitnah yang disebarkan secara tertulis dikenal sebagai libel, sedangkan fitnah yang diucapkan adalah slander. Fitnah sendiri lazimnya merupakan delik aduan, maksudnya seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan negeri, dan memang bisa mendapatkan ganti rugi.

Pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ketentuan pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam pasal 310 ayat

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan :

*“Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana denda paling lama 9 (Sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).”*

Berdasarkan Pasal diatas, penghinaan yang dapat dipidana dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan, dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak), perbuatan yang dituduhkan tidak perlu suatu perbuatan yang oleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya. Perbuatan tersebut cukup perbuatan biasa, yang sudah tentu merupakan perbuatan yang memalukan, misalnya menuduh bahwa seseorang itu telah menjual diri. Dalam hal ini bukan perbuatan yang boleh dihukum, akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan bila di umumkan. Tuduhan tersebut harus dilakukan secara lisan, apabila dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka penghinaan tersebut dinamakan menista atau menghina dengan surat (secara tertulis) dan dapat dikenakan Pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam KUHP, seseorang dianggap telah mencemarkan nama baik orang lain ketika seseorang tersebut dengan sengaja dan dengan bertujuan

agar sesuatu hal yang dengan kehormatan atau nama baik seseorang yang diketahuinya itu agar diketahui oleh orang lain.

KUHP menguraikan secara baik mengenai pencemaran nama baik yang merupakan delik aduan, yaitu seperti tercantum dalam Pasal 310 ayat (1) sampai , peristiwa pidana yang merupakan penghinaan adalah perbuatan fitnah yang menjatuhkan kedudukan, martabat, dan nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal. Yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui umum. Pebuatan ini diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan dan /atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Perbuatan yang dikategorikan sebagai pencemaran nama baik adalah :

1. Penghinaan di muka umum

Melakukan penghinaan atau tindakan lain yang menjatuhkan martabat orang lain dimuka umum. Penghinaan di muka umum dianggap sebagai tindakan yang tidak sopan, melanggar kesusilaan dan merusak kerukunan. Oleh karena itu tindakan tersebut perlu dikenakan sanksi. Istlah di muka umum bukan berarti selalu didepan umum melainkan dapat meliputi satu rumah yang dihadiri banyak orang.

2. Penghinaan di muka orangnya sendiri

Meliputi pengucapan dengan telepon langsung kepada orang yang dihina karena praktis tidak ada perbedaan dengan *face to face*. Mengenai penghinaan dengan perbuatan, jadi tanpa mengucapkan satu kata pun, mungkin banyak pendapat yang berlainan, sampai dimana

perbuatan ini merupakan penghinaan. Bisa saja seseorang yang hanya tertawa sudah menyinggung orang yang merasa ditertawakan.

Adapun pasal-pasal yang merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

1. Pasal 134, Pasal 136, Pasal 137 KUHP

Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, dengan cara menyiarkan, menunjukkan, menempelkan di muka umum, diancam pidana penjara enam tahun.

2. Pasal 142 KUHP

*“Penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap raja yang memerintah atau yang lainnya dari negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah”*

3. Pasal 143 KUHP

*“Penghinaan yang dilakukan sengaja terhadap orang yang mewakili negara asing di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah”*

4. Pasal 144 ayat (1) KUHP

*”Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang berisi penghinaan terhadap raja yang memerintah, atau kepala lainnya dari negara sahabat, atau orang yang mewakili negara asing di Indonesia, dengan maksud supaya isinya yang menghina itu diketahui oleh umum, diancam pidana penjara*

*paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah*

*(2)Jika yang bersalah, melakukan kejahatan itu pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak adanya pembedaan yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.”*

5. Pasal 207, Pasal 208 dan Pasal 209 KUHP

Penghinaan terhadap penguasa dan Badan Usaha Umum diancam pidana penjara enam tahun

6. Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315 dan Pasal 316 KUHP

Penyerang/ pencemaran kehormatan atau nama baik seseorang, tuduhan dengan tulisan, diancam pidana penjara sembilan bulan, dan enam belas bulan.

7. Pasal 317 ayat (1) KUHP

*“Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan tau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”*

8. Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP

Penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap orang mati, diancam pidana penjara empat bulan.

Sedangkan pencemaran nama baik yang dilakukan lewat media sosial, diatur pada Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Bunyi Pasal 27 ayat (3) UU ITE yaitu :

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”*

Unsur-unsur di dalam Pasal tersebut adalah :

1. Orang
2. Dengan sengaja
3. Perbuatan
  - Mendistribusikan
  - Mentransmisikan
  - Membuat dapat diaksesnya
4. Melawan hukum, yaitu dimaksud dengan “Tanpa Hak”
5. Objeknya adalah Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Sedangkan pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang berbunyi :

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”*

Ancaman pidana bagi orang yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2016, yang berbunyi :



*“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat(3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”*

Kemudian ancaman pidana bagi orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016, yaitu :

*“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Perlu kita pelajari lebih dalam mengenai Pasal diatas. Banyak pihak yang beranggapan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini merupakan delik biasa. Pemahaman ini keliru, kita harus melihat dari dua hal, yaitu dari segi esensi delik penghinaan dan dari segi historis.

Secara esensi penghinaan, pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sehingga nama baik orang tersebut tercemar dan rusak.

Dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dalam arti, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif

tentang konten atau bagian mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban.

Sedangkan konteks berperan untuk memberikan nilai obyektif terhadap konten. Pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenai suasana hati korban dan pelaku, maksud dan tujuan pelaku dalam mendiseminasi informasi, serta kepentingan-kepentingan yang ada didalam penyebarluasannya. Oleh karena itu, untuk memahami konteks, diperlukan pendapat ahli, seperti ahli bahasa, ahli psikologi, dan ahli komunikasi.

Kemudian secara historis, ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 311 KUHP. Dalam KUHP diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan. Memang sebelum adanya perubahan mengenai UU ITE, tidak ada ketentuan yang bersifat tegas bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. Tetapi setelah mengalami perubahan pada UU ITE, ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU No. 19 Tahun 2016 merupakan delik aduan. Dan lebih kuatnya lagi bahwa hal ini sudah dinyatakan juga oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008. Putusan tersebut mengenai penegasan bahwa Pasal 27 ayat (3) merupakan delik aduan. Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi butir [3.17.1], yang menjelaskan:

*“Bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah yang telah diuraikan dalam paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.”*

Adapun Pasal mengenai penghinaan Presiden yang masih menjadi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) diperluas. Berdasarkan Pasal 264 draf RKUHP hasil rapat antara pemerintah dan DPR per 10 Januari 2018, seseorang yang menyebarluaskan penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan sarana teknologi informasi dapat dipidana penjara paling lama lima tahun.<sup>22</sup>

Akan tetapi, konten yang disebarluaskan tidak bisa dikategorikan sebagai penghinaan apabila dilakukan untuk kepentingan umum, demi kebenaran dan pembelaan diri. Hal ini ditegaskan sebagai upaya untuk melindungi kebebasan berekspresi dalam berdemokrasi.

Sementara dalam KUHP yang lama, penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden melalui teknologi informasi tidak diatur.

**B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor : 354/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.**

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam

---

<sup>22</sup> <http://nasional.sindonews.com/read/1280363/13/sudah-ada-uu-ite-tak-perlu-ada-lagi-pasal-penghinaan-presiden-1518059201/> diakses tanggal 23 Januari 2019 Jam 13.00 WIB.

persidangan dan memegang teguh kebijaksanaan dalam memutuskan perkara pidana. Sebelum peneliti menguraikan mengenai penerapan hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik terhadap presiden di media sosial dalam Putusan Nomor : 354/Pid.Sus/2016/PN.Jaksel, maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Amar Putusan.

Terdakwa dalam kasus ini bernama Dr. Yulianus Paongan, S.Si, M.Si, bekerja sebagai Excutive Director Indonesia Maritime Institute dan Dosen Pasca Sarjana IPB Bogor.

Kronologis kasus ini berawal pada tanggal 12 Desember 2015, Terdakwa mengunggah beberapa kali postingan dan menuliskan status melalui twitternya dengan akun ONGEN#Jalamangkara @ypaongan. Dalam postingannya, Terdakwa mencantumkan foto Ir. Joko Widodo dan foto Nikita Mirzani dengan beberapa hastag yang memiliki unsur pornografi.

Sampai tanggal 15 Desember 2015, Terdakwa tidak henti-hentinya memposting ulang foto Ir. Joko Widodo dengan hastag yang berbeda namun memiliki unsur pornografi sehingga melanggar norma-norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat.

Bahwa ia Terdakwa Dr. Yulianus Paongan, S.Si, M.Si alias @YPAONGANAN alias YULIAN PAONGANAN pada tanggal 12 Desember 2015, 13 Desember dan 15 Desember 2015 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk di dalam bulan Desember 2015,

bertempat di Jalan Rambutan Kav. 24 A/D RT. 005 RW. 006, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

Dilihat dari kronologi kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Yulian Paongan melalui akun twitternya pada tanggal 12 Desember 2015, menuliskan status “waduh...#PapahMintaPaha #PapahMintaPaha”, telah dilihat dan diretweets sebanyak 28 followers.

Di hari yang sama terdakwa memposting satu buah foto Ir. Joko Widodo dan satu buah foto Nikita Mirzani dengan menuliskan status “selain #PapahMintaPaha ternyata juga #PapahDoyanAmoy”. Status ini dilihat dan diretweets sebanyak 29 followers.

Keesokan harinya Yulian Paongan semakin memperbanyak postingannya, sebanyak lima kali. Isinya pun tidak lain membawa nama Ir. Joko Widodo dan Nikita Mirzani. Semakin menjadi-jadi postingan yang dilakukan oleh terdakwa. Hingga merasa belum puas, terdakwa memposting menggunakan akun facebooknya <http://www.facebook.com/ypaongan> dengan status yang sama seperti di twitternya.

Adanya tindakan Terdakwa yang dilakukan secara berulang-ulang ini, yang pada akhirnya melanggar Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan dakwaan penuntut umum, maka Terdakwa dinilai melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjahtukan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dr. YULIANUS PAONGANAN, S.Si, M.Si bersalah telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap Presiden melalui media sosial.
2. Menyatakan bahwa perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Menyatakan bahwa perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 29 UU Nomor : 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Setelah selesai pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum tanggal 19 April 2016, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, maka giliran dari Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan keberatan (eksepsi) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan pada tanggal 26 April 2016.

Materi keberatan yang diajukan adalah menyangkut :

1. Kewenangan pengadilan untuk mengadili ( Kompetensi Relatif)

2. Dakwaan tidak dapat diterima atau;
3. Surat dakwaan harus dibatalkan.

Mengenai keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, walaupun tidak dijelaskan bahwa kewenangan tentang mengadili (kompetensi Relatif), tidak dijelaskan secara materiil dimana perbuatan tersebut dilakukan. Dalam berkas perkara yang dijadikan dasar perbuatan atau tempat kejadian (*Locus Delicti*), tidak disebutkan bahwa perbuatan dilakukan sebagai dasar menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara ini.

Dari keterangan Terdakwa bahwa hastag tersebut dibuatnya ketika sedang dalam perjalanan dekat dengan kantor Menteri Pertahanan yang terletak di Jakarta Pusat, dalam rangka proses kontrak pengadaan pesawat tanpa awak (*drone*) hasil karya Terdakwa, serta pada pertengahan bulan Desember 2015 ketika dalam perjalanan ke Tangerang dan ke Lembang Bandung. Sulit bagi Terdakwa untuk mengingat persis dimana lokasi tempat memposting gambar dan tulisan (hastag) seperti yang didakwakan. Penyidik dan Penuntut Umum yang kurang cermat dalam meneliti *locus delicti*, sehingga tanpa adanya dasar Yuridis yang jelas kemudian melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan demikian dari aspek Kompetensi Relatif maka jelas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini.

Alasan dakwaan tidak bisa diterima, bahwa dakwaan yang diajukan kepada Terdakwa mengandung “cacat formal” atau mengandung kekeliruan

dan mengandung kekeliruan beracara (*error ini procedure*), bisa cacat mengenai orang yang di dakwa, keliru susunan atau bentuk surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum salah atau keliru.

Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 19 April 2016 merupakan dakwaan yang mengandung “cacat formal” karena mengandung kekeliruan beracara didalam berkas perkara yang dibuat Penyidik. Penyidik melakukan kesalahan dalam hal pemeriksaan kepada Terdakwa dengan mempertanyakan apakah terdakwa saat pemeriksaan ini didampingi oleh penasihat hukum. Padahal sudah jelas bahwa pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP, Terdakwa wajib didampingi penasihat hukum yang disediakan oleh penyidik atau menunjuk sendiri.

Penyidik membuat surat pernyataan belum bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, namun didalam surat ini tidak memuat suatu pernyataan apapun dari Terdakwa. Dalam surat pernyataan tidak dilengkapi dengan Berita Acara Penolakan didampingi oleh Pengacara, padahal dilihat dari kronologi sebelum penyidikan dimulai Terdakwa sedang menunggu Penasihat Hukumnya yang sedang dalam perjalanan menuju Bareskrim Mabes Polri. Namun proses penyidikan tetap dilakukan tanpa di dampingi oleh penasihat hukum, bahkan ketika pengacara Terdakwa sampai ke Bareskrim tidak diperbolehkan untuk mendampingi Terdakwa saat proses penyidikan sedang berlangsung dengan alasan yang kurang logis. Sehingga dapat dilihat kinerja Penyidik dan Penuntut Umum seakan-akan merekayasa



pernyataan yang disampaikan Terdakwa sehingga terkesan bahwa ia tidak menggunakan kewajibannya untuk didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Masa penahanan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016, sejak perkara ini dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Akan tetapi pada persidangan pertama tanggal 19 April 2016, Terdakwa belum juga menerima surat penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, padahal kepentingan dalam pemeriksaan telah terpenuhi.

Mengenai surat dakwaan harus dibatalkan, karena terlihat bahwa sudah terjadi kesalahan pada proses surat pelimpahan perkara dan tidak diberi tanggal. Sampai sekarang Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak pernah menerima surat pelimpahan perkara, sedangkan surat dakwaan baru diterima Terdakwa pada saat persidangan, yaitu pada tanggal 19 April 2016 itupun tanpa Berita Acara. Hal ini melalaikan Pasal 143 ayat (4) KUHAP yang berbunyi :

*“Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidi, pada saat yan bersamaan dan penyampaian surat pelimpahan perkarTerdakwaa tersebut ke pengadlan negeri”.*

Dari adanya keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka giliran Jaksa Penuntut Umum menanggapi.

- Tanggapan pertama

Mengenai Kompetensi Relatif, Jaksa Penuntut Umum menganggap Kompetensi Relatif dalam mengadili tindakan ini dianggap sudah tepat.

Dikarenakan sudah adanya penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan No. 354/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Maret 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Yulian Paongan. Maka penetapan ini juga bukan tanpa alasan, dimana hal ini disandarkan pada *Teori Locus* dan *Tempus Delicti* yang dikemukakan oleh Drs.P.A.F. Lamintang, S.H & C. Djisman Samosir, S.H dalam buku Hukum Pidana Indonesia, hal.11 yang menyatakan,

1. Teori Perbuatan Materiil, yang menitikberatkan pada tempat dimana si pelaku telah melakukan sendiri perbuatan tersebut adalah *Locus delicti*
2. Teori Alat, yang menitikberatkan pada tempat dimana alat yang digunakan oleh si pelaku dalam melakukan perbuatannya itu menimbulkan akibat adalah sebagai *Locus Delicti*
3. Teori Akibat, yang menitikberatkan pada tempat dimana akibat dari perbuatan si pelaku telah timbul adalah sebagai *Locus Delicti*
4. Teori Terjadi Dimana-Mana, yang menitikberatkan pada semua tempat dimana perbuatan itu telah timbul dan semua tempat dimana alat yang digunakan telah menimbulkan jejak dari perbuatan adalah *Locus Delicti* dari suatu perbuatan pidana.

Dilihat dari teori tersebut, maka dalam perkara ini dapat digunakanlah teori terjadi dimana-mana, karena pada saat Terdakwa memposting sedang berada di lokasi yang dimana tidak berada di satu tempat, maka teori tersebut dapat digunakan. Dari kediaman Terdakwa

yang beralamat di Jl. Rambutan Kav. 24 A/D RT. 05 RW. 06 Kel. Pejaten Barat, Jakarta Selatan dapat dijadikannya *Locus Delicti* karena tempat tersebut juga digunakan sebagai satu dari sekian jejak tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Tanggapan Keberatan Kedua

Penuntut Umum beranggapan bahwa, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyesatkan semua pihak dengan tidak secara utuh. Menurut uraian M.Yahya Harahap, S.H. halaman 127 dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, beliau menyatakan bahwa *error in procedure* yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum termasuk ke dalam materi “Eksepsi Dakwaan Tidak Dapat Diterima”, padahal yang dimaksud dalam buku ini mengenai *error in procedure* adalah *Eksepsi subjudice* (tindak pidana yang didakwakan sedang tergantung pemeriksaannya), *Eksepsio in Personan* (keliru dalam mengajukan orang sebagai terdakwa), Eksepsi Keliru Sistematika Dakwaan Subsidiaritas dan Eksepsi Keliru Bentuk Dakwaan Yang Diajukan.

Dilihat dari pernyataan Penuntut Umum tersebut, mengenai pengabaian hak terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukumnya, mendatangkan saksi dan ahli pada tingkat penyidikan, pengabaian belum diterimanya Surat Pelimpahan Perkara dan surat dakwaan pun diberikan kepada Terdakwa ketika akan dibacakan dalam persidangan

tanpa Berita Acara serta pengabaian prosedur penahanan, bukanlah merupakan ruang lingkup keberatan/ eksepsi.

Dan mengenai hak Terdakwa mendapatkan bantuan hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, dalam hal ini sudah dijelaskan sebelumnya proses pemeriksaan namun faktanya ditolak oleh Terdakwa dan Surat Penryataan Belum Bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum. Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum saat pemeriksaan BAP pada tanggal 17 Desember 2015 dan ditanda tangani oleh Terdakwa dan menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan terdakwa adalah yang sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Terkait keberatan Penasihat Hukum, bahwa belum diterimanya surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan bukanlah mateeri keberatan/ eksepsi. Karena keberatan yang diajukan Penasihat Hukum tidak berdampak pada hilangnya hak dari Terdakwa karena Penasihat Hukum tetap mendapatkan surat dakwaan dan berkas perkara sehingga dapat mengajukan keberatan/ eksepsi.

Mengenai keberatan pengabaian prosedur penahanan terdakwa bukanlah suatu keberatan/ eksepsi karena tidak ada hubungan dengan syarat pembuatan atau materi yang terdapat dalam surat dakwaan.

Alasan Jaksa Penuntut Umum terlambat membuat Berita Acara ini disebabkan karena keterlambatan Jaksa Penuntut Umum mendapatkan Penetapan penahanan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menanggapi keberatan Penasihat Hukum mengenai Surat Dakwaan yang kabur, Penuntut Umum menganggap ini bukan suatu kelalaian. Karena sesuai pada Pasal 2 ayat (3) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa :

*“kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan” dimana dalam penjeasannya dinyatakan: “yang dimaksud dengan ‘kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan’ adalah satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dibidang penuntutan yang bertujuan memlihara ksatuan kebijakan dibidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja kejasaan, oleh karena itu kegiatan penuntutan di pengadilan tidak akan berhenti hanya karena jaksa yang semula bertugas berhalangan. Dalam hal ini tugas penuntutan oleh kejaksaan akan tetap berlangsung sekalipun untuk itu dilakukan oleh jaksa lainnya sebagai pengganti”*

Maka dari itu, siapapum dari para penuntut umum yang menyidangkan kasus ini adalah sah menurut hukum sekalipun ia tidak ikut menandatangani Surat Dakwaan karena semua tugas yang diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku Penuntut Umum adalah untuk semua nama yang tercantum dalam Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian Perkara Pidana. Maka Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak keberatan/ eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum.

Mengenai Surat Dakwaan tidak ada tanggal, Penasihat Umum mengakui adanya hal tersebut. Namun itu tidak berpengaruh dan tidak

menyebabkan akibat hukum. Kecuali terdapat suatu kelalaian yang tidak berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP.

Dari hasil putusan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pidana ini, maka putusan sebagai berikut :

1. Menerima keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum;
3. Memerintahkan agar persidangan dalam perkara pidana Nomor :354/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel. Atas nama Dr. Yulianus Paonganan S.Si, M.Si alias @YPAONGANAN alias Yulian Paonganan dihentikan;
4. Membebaskan Terdakwa dari Tahanan;
5. Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam putusan ini dibebankan kepada negara yang besarnya Rp. 0,- (nihil)

### C. Analisis Peneliti

Didalam peraturan yang berlaku di suatu negara atau hukum positif, sudah pasti diimbangi oleh aparat penegak hukum yang memiliki pengetahuan dan kecerdasan dalam melakukan tugasnya. Tetapi sangat disayangkan ketika sebuah kesalahan atau kecerobohan dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ketika itu menjadi suatu rutinitas, seharusnya kesalahan mudah di minimalisir bahkan tidak ada celah baginya.

Berdasarkan keterangan diatas bahwa, adanya celah dari proses penyidikan yang di lakukan aparat penegak hukum di tingkat Polri dan Kejaksaan sehingga menyebabkan Terdakwa untuk mendapatkan peluang dalam pembelaannya. Bahwa didalam surat dakwaan tersebut terdapat banyak kesalahan prosedur dalam beracara sesuai dengan ketentuan KUHAP yang biasa disebut *error in procedure*. Yang pertama adalah bahwa Terdakwa dituntut di atas 5 tahun, maka Terdakwa seharusnya wajib untuk didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat diperiksa oleh Penyidik. Akan tetapi pada kenyataannya Penyidik tidak memperkenankan Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukumnya. Hal ini jelas menyalahi atauran atau mengabaikan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi :

*“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.”*

Dalam pasal ini sangat jelas bahwa Terdakwa memiliki hak yang bersifat wajib untuk didampingi dan menunjuk penasihat hukumnya. Namun yang

terjadi Penyidik mengabaikan ketentuan tersebut yang seharusnya pemeriksaan menjadi tidak sah. Jika itu masuk ke dalam *error in procedure*, maka tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Dan pengabaian secara sengaja Pasal 65 jo. Pasal 114 jo. Pasal 116 ayat (3), ayat (4) jo. Pasal 129 ayat (2) KUHAP tentang Hak mendatangkan saksi ahli pada tingkat penyidikan.

Penyidik wajib memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum, dan didalam perkaranya wajib untuk didampingi Penasihat Hukum. Dan apabila ada sesuatu yang menguntungkan bagi Terdakwa dalam keterangan saksi, maka hal itu dapat dicatat dalam Berita Acara.

Bahwa penyidik keliru memaknai arti yuridis hak dan kewajiban dalam melakukan penyidikan perkara ini. Sayangnya Penuntut Umum turut membenarkan sesat pikir yang dilakukan oleh penyidik dalam perkara ini.

Setelah Penyidik mencatat keterangan dari saksi dan berlaku juga keterangan ahli, maka mereka wajib untuk mengucapkan sumpah atau janji mengenai keterangan yang disampaikan adalah yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya menurut pengetahuan bidang keahliannya.

Tetapi pada kenyataannya hak atas Terdakwa tidak diberikan. Barulah setelah dipengadilan hak itu diberikan, baru bisa mendatangkan Penasihat Hukum. Ini terkesan sia-sia. Penyidik seolah-olah meremehkan posisi Terdakwa.



Atas penambahan masa penahanan yang diterima oleh Terdakwa. Peneliti menilai bahwa penambahan ini akan terkesan sia-sia. Alasan dari penyidik untuk mencari bukti-bukti yang sah karena adanya ketidak cukupan bukti untuk meneruskan perkara Terdakwa ke Pengadilan.

Sedangkan dilihat dari fakta bahwa Terdakwa hanya melakukan postingan saja, dan sekiranya bukti sudah didapatkan semua oleh Penyidik. Jika proses P20 menjadi P19, maka sebaiknya Terdakwa dibebaskan. Karena dasar dari pelanggaran Terdakwa ada pada postingan tertanggal 12 sampai 15 Desember. Jika benar mau mencari bukti lain, kemungkinan Penyidik akan melihat postingan yang lebih lama lagi. Tetapi itu tidak disahkan karena melihat dari dasar pelanggaran Terdakwa.

Didalam proses pembuatan Surat Dakwaan, Penuntut Umum lalai mencantumkan tanggal. Hal ini melanggar Pasal 143 ayat (2), bahwa Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani. Ketika pasal tersebut dilanggar maka dakwaan ini batal demi hukum.

Ini merupakan syarat formil dakwaan, jika ini terlupakan maka fatal bagi Aparat Penegak Hukum. Yang seharusnya hal tersebut mudah sekali untuk tidak terjadi. Kecerobohan ini menunjukkan jaksa tidak profesional. Mengapa hal tersebut tidak terkontrol, padahal dalammerilis suatu dakwaan adanya birokrasi kontrol yang harus dilalui. Dan ketika hal tersebut lolos sampai pada pelimpahan di Pengadilan, maka bisa dikatakan ini merupakan ketidakprofesionalaan yang dilakukan secara kolektif.

Kesalahan ini bisa menjadi tamparan keras bagi Jaksa Penuntut Umum. Karena kesalahan yang tidak mungkin terjadi ini yang pada akhirnya memberikan kekalahan bagi aparat penegak hukum. Suatu kelalaian yang berakibat pada lolosnya terdakwa.

Kemungkinan kesalahan ini adalah bentuk kesengajaan bisa saja terjadi. Ketidaksiatan dalam memproses perkara tersebut karena menurut peneliti ini merupakan suatu perkara kecil. Atau hanya sebagai bahan pemberi pelajaran bagi pengguna media sosial. Karena tahun ini merupakan tahun yang sangat rentan dengan permasalahan politik.

Hal ini sedang marak terjadi dan menurut peneliti sangatlah wajar ketika di sebuah komentar atau ujaran kebencian muncul di media sosial. Banyak sekali para pelaku pencemaran nama baik di media sosial tetapi hal tersebut rupanya dibiarkan begitu saja.

Pada intinya hukum memiliki sebuah asas, yaitu asas persamaan di mata hukum. Jika permasalahan ini dikasuskan, akan berapa banyak orang yang terjerat tindak pidana. Terdakwa Yulian Paongan adalah warga Indonesia yang memiliki hak berpendapat di muka umum.

Wajarlah ketika seorang tokoh atau Presiden sekalipun mendapat perlakuan seperti itu. Kita bisa melihat pada tahun-tahun sebelumnya bahwa kritikan yang menuju pada kinerja Pemerintah sangatlah banyak. Itulah bentuk ekspresi dari masyarakat yang mungkin perlu di dengar dan di perhatikan.

Hak untuk menyatakan suatu pendapat dimuka umum, hak untuk merdeka, hak untuk sejahtera. Ketika hal tersebut sudah diungkapkan tetapi tidak mendapatkan respon dari pemerintah apakah mereka akan diam saja. Dipastikan bahwa akan terjadi pemberontakan.

Layaknya mahasiswa yang telah melaksanakan kewajiban untuk berbuat baik, membayar registrasi, dan lain sebagainya. Tetapi mahasiswa juga memiliki hak untuk belajar, mendapatkan fasilitas. Ketika hal tersebut tidak didapatkan maka terjadilah pemberontakan mahasiswa karena haknya tidak diberikan. Dan dapat berujung pada penurunan birokrasi.

Sama halnya di Kenegaraan, masyarakat memiliki hak dan kewajiban. Dan pemerintahlah yang memastikan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Ketika hak tersebut tidak terpenuhi kepada siapa masyarakat akan meminta.

Presiden maupun jajaran pemerintah seharusnya tidak anti kritik. Bentuk kritik adalah sebuah pembelajaran maupun perbaikan. Ketika pemerintah melakukan suatu pelanggaran hukum, masyarakat pun mempunyai hak untuk menurunkan.

Tiada suatu perbuatan tanpa adanya alasan. Bisa saja Terdakwa geram melihat Pemerintah yang tidak bijak. Tetapi inilah negara demokrasi, segala hal bebas disampaikan dengan suatu dasar.

Berdasarkan putusan sela yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, bukan berarti bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena pemeriksaan a quo belum pada pemeriksaan substansi (materi) perkara, yang membuktikan apakah

Terdakwa bersalah melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, atau sebaliknya.

Mengenai pasal 134, pasal 136 dan pasal 137 KUHP tentang penghinaan presiden seharusnya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini Indonesia yang berbentuk Republik dan menganut asas demokratis. Aturan tersebut awalnya adalah adaptasi dari hukum Belanda, yaitu penghinaan terhadap keluarga kerajaan.

Beralih pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE, banyak pihak yang beranggapan bahwa pasal ini merupakan delik biasa. Padahal ini keliru, peneliti melihat dari dua hal, yaitu dari segi esensi delik penghinaan dan dari segi historis.

Secara esensi penghinaan, pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sehingga nama baik orang tersebut tercemar dan rusak.

Dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang hanya dapat dinilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari informasi atau Dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Oleh karena itu, perlindungan diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban.

Sedangkan konteks berperan untuk memberikan nilai obyektif terhadap konten. Pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenai suasana hati korban dan pelaku, maksud dan tujuan pelaku dalam mendiseminasi

informasi, serta kepentingan-kepentingan yang ada di dalam penyebarluasannya. Oleh karena itu, untuk memahami konteks, diperlukan pendapat ahli, seperti ahli bahasa, ahli psikologi, dan ahli komunikasi.

Kemudian secara historis, ketentuan Pasal 27 ayat(3) UU ITE mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya<sup>311</sup> KUHP. Dalam KUHP diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan. Memang sebelum adanya perubahan mengenai UU ITE, tidak ada ketentuan yang bersifat tegas bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. Tetapi setelah mengalami perubahan pada UU ITE, ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU No. 19 Tahun 2016 merupakan delik aduan. Dan lebih kuatnya lagi bahwa hal ini sudah dinyatakan juga oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008. Putusan tersebut mengenai penegasan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini merupakan delik aduan. Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi butir [3.17.1], yang menjelaskan :

*“Bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah yang telah diuraikan dalam paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus*

*ditafsirkan sebagai deluk yang mensyaratkan pengaduan untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.”*

Di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah menjadi sesuatu yang mengerikan bagi kehidupan berdemokrasi dan kebebasan berekspresi di Indonesia. adanya pasal karet tersebut justru akan menghancurkan tegaknya demokrasi di Indonesia.

Pasal tersebut juga lebih luas cakupan atau pengaturan mengenai pencemaran nama baik atau penghinaannya dibandingkan dengan KUHP yang secara jelas bahwa perbuatan penghinaan oleh seseorang harus ditujukan langsung kepada seseorang dan merupakan delik aduan.

Begitu pula pada pasal 28 ayat (2) UU ITE yang disangkakan kepada terdakwa. Pasal tersebut merupakan delik aduan yang harusnya engacu pada Pasal 156 KUHP. Artinya harus ada yang mengadukan dan ia tidak bisa berdiri sendiri. Harus jelas siapa yang mengadukan Yulian Ponganan dan soal penyebaran kebencian apa yang dijadikan alasan.

Berdasarkan keterangan bahwa pelapor bukanlah dari Ir. Joko Widodo. Sudah terlihat bahwa tidak ada kerugian atas korban. Mengenai kebencian, dilihat dari postingan yang dilakukan oleh Terdakwa mengenai makian, ejekan dan kata-kata kasar, semestinya itu bukan suatu kebencian. Memang dilihat terkesan tidak sopan tetapi ini bukan ujaran kebencian.

Kebencian itu sendiri apabila Terdakwa mengajak atau menyerukan tindakan kriminal atau kekerasan terhadap seseorang atau kelompok. Atau jika Terdakwa melakukan makar yang bertujuan untuk menggulingkan

Pemerintahan dengan kekerasan. Menurut peneliti itu yang dinamakan kebencian.

Peneliti bukan mendukung pada perbuatan Terdakwa, melainkan lebih menitikberatkan pada pasal karet yang ada di dalam UU ITE. Pasal ini sudah tidak lagi untuk memidanakan para pengguna sosial yang melakukan perbuatan ilegal, tetapi lebih fokus pada penangkapan yang melakukan kritikan terhadap pemerintah. Bahkan sudah menjadi pasal anti demokrasi. Terbukti selama tahun 2015 ini sudah ditimpakan 70 orang.

Jika Terdakwa memang harus dihukum, seharusnya ia dihukum menggunakan norma sosial yang seharusnya dipakai bukan pada undang-undang, karena yang dilanggar adalah etika. Karena tidak ada unsur kriminal disini, tidak ada muatan kekerasan maupun merusak fasilitas publik.

Pasal ini juga bisa digunakan untuk kepentingan politik yang bersifat ganda. Jika pelakunya adalah orang yang anda benci, maka anda pasti akan menggunakan pasal tersebut. Dan sebaliknya, jika pelaku adalah kerabat maka anda tidak akan menyetujui adanya penggunaan pasal tersebut.

Jika pelaku adalah orang yang anti Jokowi. Pasti yang pro dengan Jokowi akan menuntut mati-matian terhadap pelaku dengan pasal tersebut. Tetapi jika pelaku adalah orang yang pro Jokowi, mereka tidak akan terima dengan adanya pasal tersebut karena dianggap tidak demokrasi.

Mengapa disini peneliti sangat menyayangkan adanya pasal tersebut. Peneliti bukan orang anti Jokowi atau juga anti oposisi. Hanya saja peneliti

bersifat obyektif ketika suatu peraturan dibuat atas kepentingan politik yang salah.

Perjuangan dalam memperoleh ruang demokrasi sudah mati-matian dilakukan oleh para pejuang. Ketika itu dilenyapkan kembali oleh orang yang memiliki kepentingan, maka negara ini akan mengalami kemunduran era. Ketika ini terjadi, akan banyak penguasa memberikan kebijakan yang menguntungkan bagi dirinya sendiri, sedangkan masyarakat yang menanggung resikonya. Mereka hanya bisa terdiam karena takut akan bayangan-bayangan jeruji sel ketika masyarakat ingin memberontak dan ingin mengambil haknya.

Beruntunglah putusan perkara pidana ini belum sampai pada perbuatan. Karena Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang dinilai Majelis hakim cacat formal yang pada akhirnya dibatalkan demi hukum. Dan meminta agar Persidangan ini diberhentikan. Jika putusan Majelis Hakim sidang sampai pada perbuatan terdakwa, maka akan ada 1 korban lagi akibat pasal karet ini.

Hukum memang suatu keharusan untuk ditegaskan, tetapi harus pula melihat kemanfaatan bagi masyarakat. Ketika aturan yang dibuat merugikan masyarakat maka seharusnya aturan tersebut dikaji kembali sesuai dengan kultur dan kebutuhan masyarakat.

Agar tidak ada sitem terbang pilih didalam penegakan hukum. Pertanggung jawaban bagi penegak hukum bukan pada dunia saja, melainkan dibawa sampai akhirat. Berat memang tugas daripada pembuat peraturan atau



tugas penegak hukum. Tetapi akan terasa ringan jika kita menggunakan akal pikiran, hati nurani serta iman kita.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakuakn oleh peneliti, maka kesimpulannya yaitu

1. Adanya ketentuan hukum tentang pencemaran nama baik di media sosial ini memiliki dasar hukum yang berbeda-beda. Dilihat dari delik aduan atau delik umum. Dari adanya perbedaan ini, terjadi permasalahan penggunaan dasar hukum.
2. Berdasarkan putusan perkara pidana oleh Majelis Hakim, yang memutuskan putusan sela, karena berbagai pertimbangan bahwa adanya kesalahan bagi Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum. Dengan adanya putusan ini bukan berarti Terdakwa tidak melakukan perbuatan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka penelitidapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlunya penambahan teori-teori dala penerapan hukum, guna memaksimalkan kinerja dan kualitas penegak hukum demi terciptanya rasa aman dan adil pada masyarakat.
2. Kemajuan teknologi yang harus didampingi oleh sebuah aturan hukum yang seimbang. Karena hukum harus berjalan seiring perkembangan zaman yang diamana akan terciptanya hukum yang seadil-adilnya.

3. Dari adanya aturan yang berlaku mengenai pencemaran nama baik di media sosial. Pemerintah diharapkan selalu mengkaji peraturan perundang-undangan guna terciptanya hukum yang pasti.
4. Pentingnya sosialisasi lebih dalam mengenai peraturan perundang-undangan. Agar masyarakat memahami dan sadar akan hukum. Tidak ada salah tafsir dalam menilai suatu aturan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku – Buku :**

- Budhijanto, Danrivanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, Cet. Ke-1, 2017.
- Kadarudin, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Andrisman, Tri, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, 2007.
- Muchladun, Wildan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 3, 2015.
- Mulawarman dan Aldila Dyas Nurfitri, “Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan”, dalam *Jurnal Buletin Psikologi*, Volume 25, Nomor 1, 2017.
- Samosir, C. Jiman, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, Cet ke-1, 2018.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. Ke- 13, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-3, 2015.

### **Jurnal :**

- Muchladun, Wildan, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 3, 2015, hlm. 4.

### **Perundang – Undangan :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

**Website :**

<http://nasional.sindonews.com/read/1280363/13/sudah-ada-uu-ite-tak-perlu-ada-lagi-pasal-penghinaan-presiden-1518059201>

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt520aa5d4cedab/pencemaran-nama-baik-di-media-sosial-delik-biasa-atau-aduan/>